

PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI ATAS TANAH ULAYAT: ANTARA KEPENTINGAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

Azzahra Nurrachman

ABSTRAK

Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur diharapkan menjadi solusi guna menekan kesenjangan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakpastian terkait pemberian legitimasi serta jaminan perlindungan atas hak masyarakat adat yang terdampak langsung oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketidakterlibatan masyarakat adat secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan turut mengancam eksistensi budaya, tradisi, dan ruang hidup yang pengelolaannya telah berlangsung secara berkelanjutan antar generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembangunan IKN di atas tanah ulayat serta menelaah sejauh mana jaminan negara terhadap hak-hak masyarakat adat diwujudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN menimbulkan tantangan serius terkait legitimasi hukum dan pengamanan kepemilikan lahan komunitas adat. Meskipun berbagai ketentuan hukum nasional telah mengakui hak-hak masyarakat adat secara normatif, lemahnya pengakuan administratif dan tidak tersedianya ruang partisipasi yang efektif menyebabkan posisi masyarakat adat menjadi semakin rentan dalam proses pembangunan. Kondisi ini mencerminkan belum efektifnya implementasi jaminan konstitusional yang seharusnya melindungi eksistensi serta hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah pembangunan IKN.

Kata kunci: ibu kota nusantara, perlindungan hukum, masyarakat adat

**PROBLEMATICS OF DEVELOPING THE INDONESIAN CAPITAL CITY
ON TRADITIONAL LAND: BETWEEN STATE INTERESTS AND
PROTECTION OF INDIGENOUS COMMUNITIES**

Azzahra Nurrachman

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's capital city to East Kalimantan is expected to serve as a solution to reduce regional disparities, promote equitable economic growth, and accelerate infrastructure development. However, in practice, there remains considerable uncertainty regarding the legitimacy and legal protection of the rights of Indigenous Peoples directly affected by the development of the new capital, Nusantara (IKN). The lack of meaningful involvement of Indigenous communities in the planning and decision-making processes poses a threat to the continuity of their culture, traditions, and living spaces—resources that have been sustainably managed across generations. This study aims to analyze the legal and social issues surrounding the development of IKN on customary land (tanah ulayat) and examine the extent to which the state guarantees the rights of Indigenous Peoples. A normative juridical approach is employed, focusing on the analysis of relevant legislation and legal documents. The findings indicate that the development of IKN presents significant challenges concerning the legal legitimacy and security of Indigenous land ownership. Although various national legal instruments formally recognize Indigenous rights, weak administrative recognition and the absence of effective participatory mechanisms have rendered Indigenous communities increasingly vulnerable in the development process. This condition reflects the ineffective implementation of constitutional guarantees that ought to protect the existence and rights of Indigenous Peoples within the IKN development area.

Keywords: *nusantara capital city, legal protection, indigenous peoples*